

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara filosofi suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Dengan perkataan lain proses pembangunan merupakan proses memanusiakan manusia (Rustiadi dkk, 2011). Sesuai dengan pendapat Todaro (2006) yang menyatakan bahwa pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi pembangunan suatu negara dapat dikatakan baik tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonominya yang semakin meningkat saja, tetapi juga dilihat dari aspek-aspek lain seperti yang telah tersebut di atas.

Pada teori neoklasik dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesis ini kemudian lazim dikenal sebagai Hipotesis Neo-klasik. Lebih lanjut pada Hipotesis Neo-klasik dijelaskan bahwa pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesis ini dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa pada negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah (Sjafrizal, 2012).

Berdasarkan pendapat Adisasmita (2010), wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek 3 fungsional. Sedangkan menurut pendapat Rustiadi dkk (2011), wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik (tertentu) di mana komponen-komponennya memiliki arti di dalam pendeskripsian perencanaan dan pengelolaan sumber daya pembangunan. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa tidak ada batasan spesifik dari luasan suatu wilayah. Istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu.

Menurut Nuraini (2010) potensi ekonomi pada dasarnya dapat diartikan sebagai sesuatu atau segala sesuatu sumberdaya yang dimiliki oleh daerah baik yang tergolong pada sumberdaya alam (natural resources/endowment factors) maupun potensi sumberdaya manusia yang dapat memberikan manfaat (benefit) serta dapat digunakan sebagai modal dasar pembangunan (ekonomi) wilayah. Potensi ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala kemampuan atau komoditi ekonomi yang ada pada suatu daerah yang dapat dikembangkan karena mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif. Menurut Tarigan (2007), keunggulan komparatif bagi suatu negara atau daerah adalah bahwa komoditi tersebut lebih unggul secara relatif dibandingkan komoditi lain di daerahnya. Pengertian unggul dalam hal ini adalah dalam bentuk perbandingan dan bukan dalam bentuk nilai tambah riil. Komoditi yang memiliki keunggulan komparatif tersebut dapat dijadikan sebagai sektor basis pada suatu daerah

Pembangunan ekonomi daerah melibatkan multisektor dan pelaku pembangunan, sehingga diperlukan kerjasama dan koordinasi diantara semua pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah akan bertanggung jawab secara lebih penuh terhadap kebijakan dasar yang diperlukan bagi pembangunan daerah, khususnya yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana, investasi dan akses terhadap sumber dana, kebijakan lingkungan, pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) serta pengembangan sumberdaya manusia.

Sejak era reformasi tahun 1999 terjadi pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi atau disebut Otonomi daerah yang mengandung makna, beralihnya sebagian besar proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah. Hal ini membawa implikasi mendasar terhadap keberadaan tugas, fungsi dan tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah yang antara lain dibidang ekonomi yang meliputi implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah serta pencarian sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan dengan cara menggali potensi yang dimiliki oleh daerah. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kebijakan daerah itu sendiri dalam menentukan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Arsyad, 1999).

Kabupaten Pulau Morotai sebagai wilayah pemekaran dibagi menjadi 6 kecamatan yaitu Morotai Selatan, Morotai Timur, Morotai Utara, Morotai Jaya dan Pulau Rao. Dengan luas wilayah yang tersedia, tentunya potensi yang dimiliki oleh daerah ini relatif banyak untuk dikembangkan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pasca dari pemekaran wilayah mengharuskan kemandirian dan kreatifitas pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam mendesain model strategi pembangunan daerah, karena dengan diberlakukannya otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah agar mendesain model pembangunan daerah berdasarkan karakteristik dan potensi ekonomi daerah. Untuk mencapai harapan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai harus memiliki struktur ekonomi yang jelas dan mampu merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi daerah secara berkesinambungan dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan serta dokumen terkait dengan perencanaan agar dapat mengoptimalkan potensi ekonomi daerah (BPS Kabupaten Pulau Morotai 2019).

Keberhasilan pembangunan ekonomi dilihat melalui pertumbuhannya, dimana pertumbuhan ekonomi dapat diukur salah satunya menggunakan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB). Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan ekonomi lokal di era otonomi yang mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, secara otomatis menuntut pemerintah daerah untuk berorientasi secara global. Dikarenakan kondisi tingkat persaingan antar negara yang semakin tinggi dan tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada perekonomian di Indonesia khususnya di daerah. Oleh karena itu, tantangan pemerintah daerah bukan lagi pada otonomi maupun desentralisasi, melainkan daerah dituntut untuk meningkatkan daya saingnya. Dengan mengembangkan produk unggulan, maka eksistensi suatu wilayah akan tetap terjamin. Oleh karena itu identifikasi dan analisis sektor ekonomi potensial menjadi hal penting bagi setiap kabupaten. Kabupaten Pulau Morotai merupakan kabupaten di Provinsi Maluku Utara, yang mempunyai potensi wilayah, kondisi geografis maupun potensi khas lain yang berbeda dengan kabupaten/kota lainnya. Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian pulau morotai di dominasi oleh lima kategori lapangan usaha, yaitu: Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan; Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintah, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib; Konstruksi; Dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentuk PDRB Pulau Morotai.

Tabel 1.1

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pulau Morotai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2019 (Persen)

NO	JENIS LAPANGAN USAHA	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	47.32	47.48	47.27	47.15	45.27
2	Pertambangan dan Penggalian	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05
3	Industri Pengolahan	5.11	4.86	4.61	4.38	4.14
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.05	0.08	0.09	0.09	0.09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
6	Konstruksi	7.80	7.97	8.24	8.68	9.14
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19.46	19.43	19.63	19.64	20.54
8	Transportasi dan Pergudangan	2.06	2.33	2.44	2.44	2.52
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15
10	Informasi dan Komunikasi	1.16	1.14	1.15	1.17	1.19
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.42	1.47	1.43	1.43	1.39
12	Real Estat	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
13	Jasa Perusahaan	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.90	9.43	9.26	9.08	9.69
15	Jasa Pendidikan	3.32	3.34	3.41	3.46	3.58
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.50	1.55	1.56	1.58	1.55
17	Jasa Lainnya	0.49	0.49	0.48	0.47	0.48
18	PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Pulau Morotai Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1.1. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Pulau Morotai pada tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian,kehutanan,dan perikanan, dengan kontribusi sebesar 45,05 persen. Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar Dan Eceran;Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor sebesar 20,95 persen, disusul oleh Admistrasi Pemerintah, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,58 persen. Berikutnya lapangan usaha Konstruks Besar 9,15 persen dan lapangan usaha industri pengolahan sebesar 4,17 persen. Meksipun selama kurun wakru lima tahun lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan memiliki kontribusi sebesar terhadap PDRB Maluku Utara, namun besarnya nilai Kontribusi Pertanian,Kehutanan Dan Perikanan

Meskipun selama lima tahun sektor lapangan usaha pertanian,kehutanan, dan perikanan memiliki kontribusi paling besar terhadap PDRB Pulau Morotai,sektor tersebut terus mengalami sedikit demi sedikit dari tahun ke tahun,kecuali pada tahun 2016,lapangan usaha Pertanian,Kehutanan, Dan Perikanan pada tahun 2015 memiliki kontribusi 47,48 persen sedangkan pada tahun 2019 menurun menjadi 45,05 persen. Penurunan kontribusi

Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan ini diikuti oleh semakin meningkatnya peranan lapangan usaha sekunder dan tersier (perdagangan dan jasa-jasa)

1.2. Rumusan masalah

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PBDR). Menurut (Sjafrizal, 2014) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data dan informasi dasar tentang kegiatan ekonomi suatu daerah. Secara definitif, PDRB adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah pada periode tertentu. Sektor-sektor ekonomi yang masuk dalam komponen Produk Domestik Regional Bruto adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi makan dan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, sektor pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor jasa-jasa lainnya (BPS Kabupaten Pulau Morotai Tahun (2015-2019).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diambil beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Apa saja yang menjadi sektor basis Kabupaten Pulau Morotai ?
2. Sektor ekonomi manakah sebagai sektor ekonomi prima, berkembang, potensial, dan terbelakang dalam perekonomian daerah Kabupaten Pulau Morotai selama periode pengamatan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di Kabupaten Pulau Morotai

1. Menganalisis sektor basis yang ada di Kabupaten Pulau Morotai
2. Untuk mengetahui sektor ekonomi mana sebagai sektor ekonomi prima, berkembang, potensial, dan terbelakang dalam perekonomian daerah Kabupaten Pulau Morotai selama periode pengamatan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

2. Sebagai bahan pertimbangan baik bagi pemerintah Provinsi maupun pemerintah daerah atau pihak-pihak terkait lainnya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pulau Morotai. Sehingga dapat meningkatkan investasi dan pembangunan daerah dan selanjutnya dapat tercapai pengembangan wilayah yang diinginkan
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi para pembaca yang ingin melakukan penelitian yang sama